

Judul : Bos adan Pangan Belum Ada, Gebrakannya Sudah Ditunggu
Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Perpres Soal Pangan Sudah Terbit Dua Bulan

Bos Badan Pangan Belum Ada, Gebrakannya Sudah Ditunggu

Badan Pangan Nasional resmi terbentuk seiring keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021. Badan Pangan ini merupakan sebuah harapan baru, angin segar dalam menjawab berbagai persoalan pangan.

ANGGOTA Komisi IV DPR Firman Soebangyo menuturkan, Badan Pangan ini akan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pangan. Bahwa badan ini semata-mata dibentuk untuk dalam rangka menuju kepada ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

"Walaupun demikian, jangan sampai badan pangan ini mati suri karena memang masalah pangan ini banyak yang berkepentingan," kata Firman di Jakarta, kemarin.

Firman bilang, negara diharuskan memiliki kemampuan untuk menyiapkan kebutuhan pokok masyarakat secara mandiri. Apalagi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) memperkirakan populasi penduduk akan

terus meningkat dan pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 300 juta jiwa. "Artinya kebutuhan pangan ini sangat penting dan fundamental," tegasnya.

Produktivitas pertanian, lanjutnya, mengalami tantangan berat. Produksi pangan menurun akibat lahan yang terus digerus untuk berbagai kepentingan. Anomali musim juga menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan produktivitas. Lalu, tidak siapnya petani menggunakan perangkat teknologi modern seperti alat mesin pertanian atau alsintan.

"Ini tantangan yang sangat luar biasa. Belum lagi kerusakan lahan yang sudah merata di mana-mana akibat penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan. Urea ini kan merusak unsur hara tanah tapi sampai

sekarang dipertahankan terus," keluhnya.

Dia berharap, Presiden Jokowi menempatkan figur yang betul-betul berintegritas dan punya pengalaman sebagai bos badan pangan ini. "Dia juga harus berani memberantas mafia pangan karena mafia pangan ini selalu jadi momok," tegasnya.

Firman menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi dalam memilih bos pangan ini. Yang penting, bisa mengarahkan kerja-kerja badan ini sebagai mana perintah undang-undang dan tidak sampai terkontaminasi dengan kepentingan para mafia pangan. "Kalau itu terjadi maka tidak ada gunanya badan pangan ini terbentuk," pungkasnya.

Hal senada dilontarkan kolega Firman di Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin. Akmal menuturkan, semestinya Presiden bisa segera melantik bos pangan ini sehingga bisa mulai fokus bekerja dalam menata persoalan pangan. "Saya meminta agar Badan Pangan Nasional dapat segera menata diri untuk be-

kerja, dimulai dengan penyajian informasi institusi di website kenegaraan," kata Akmal.

Akmal menegaskan kerja-kerja badan pangan harus bisa dirasakan masyarakat. Selama ini masyarakat sering mengeluhkan berbagai persoalan pangan mulai dari harga hingga pasokan. Kebijakan pangan harus mampu mengangkat taraf hidup petani dan peternak, di satu sisi pasokan yang diperoleh masyarakat tersedia dengan harga terjangkau.

Politisi PKS asal Sulawesi Selatan ini menekankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga pangan, dan sistem distribusi pangan. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tugas untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien.

"Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pangan yang paling strategis mesti mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Sehingga pengelolaan pangan nasional yang tersebar ke berbagai instansi seperti Kementerian, Bulog, BUMN Pangan dan Kemendag dapat diintegrasikan semaksimal mungkin," harapnya.

Terkait kegiatan prioritas yang ada di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian, Akmal berharap tetap bisa direalisasikan oleh badan pangan. Terutama pada program ketahanan pangan berupa Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Adapun LPM ini merupakan salah satu kegiatan yang berfungsi untuk mengelola stok pada saat musim panen raya/paceklik dan mengantisipasi gejolak harga pangan.

"Badan Pangan Nasional harus cepat bergerak dan bekerja agar kerja-kerja BKP pertanian dapat dilipatgandakan dengan terbentuknya badan pangan ini. Tapi ini sudah dua bulan lebih keluar Perpresnya tapi informasi yang disajikan masih saja berupa regulasi, bukan kinerja," sesal Akmal. ■ KAL